4 Pasangan

Sambungan hal 1

Dalam undian nomor urut tersebut paslon cabup-cawabup Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd-Mahmud Ardi Widanto SIP memperoleh nomor 1, sedangkan nomor urut 2 paslon Dr H Immawan Wahyudi-Dra Martanty Soenar Dewi. Sedangkan paslon Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi mendapatkan nomor urut 3 dan paslon H Sunaryanta-Heri Susanto memperoleh nomor undian 4. "Sesuai PKPU ini juga kampanye terbuka, konser musik ditiadakan. Namun untuk kampanye terbatas,harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam rangka mendukung pencegahan maupun penanggulangan Covid-19," imbuh Ahmadi Ruslan Hani.

Usai melaksanakan undian nomor urut, empat paslon juga menandatangani pakta integritas dan deklarasi kampanye damai. Beberapa poin intinya yakni saling menghormati sesama paslon dalam pelaksanaan setiap tahapan pilkada, tunduk taat pada aturan kampanye dan menjaga ketertiban dalam setiap kegiatan kampanye. Selain itu menyelesaikan masalah yang terjadi dengan jalan musyawarah mufakat dan menghindari segala bentuk kekerasan, intrik, intimidasi dan provokasi untuk meraih kemenangan.

"Tidak jual beli suara, manipulasi suara dan penyuapan kepada pemilih serta penyelenggaraan pemilihan. Serta menghormati proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan paslon terpilih," jelasnya.

(Ded/Ewi)-d

AHM-JP

Sambungan hal 1

"Dalam kampanye juga berhati-hati dalam berucap di media sosial terutama kaitan isu SARA ini sensitif dan kita wajib menghindari dan berkampanye dengan penuh martabat," tegasnya.

Drs H Suharsono menambahkan dalam pengundian nomor urut paslon, kami melarang relawan dan laskar satu pun untuk datang juga mengingat status saya juga masih sebagai kepala daerah.

"Itu akan merugikan semua jadi saya imbau semua untuk melakukan kampanye damai untuk proses demokrasi waktunya kita bersatu tidak ada musuh-musuh," tegasnya.

Suharsono menambahkan pihaknya berkomitmen akan melanjutkan ke periode kedua untuk bisa menyelesaikan PR yang banyak dan siap memberi contoh kepada yang lain untuk memberantas korupsi.

Abdul Halim Muslih (AHM) menambahkan Bantul sedang perlu persatuan. "Dengan bersatu kita akan maju. Tidak mungkin kita ini membangun sebuah daerah yang luas dan kaya raya dengan penduduk yang hampir satu juta ini tanpa persatuan antara pemerintah dan rakyat. Kami ditakdirkan oleh Tuhan hari ini untuk memperoleh nomer satu dan Insya Allah menjadi nomer satu," urainya. **(Aje)-f**

Pasangan

Sambungan hal 1

urut pengambilan itu juga sama dengan nomor urut pasangan calon," kata Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi di Gedung Serba Guna, Kamis (23/9).

Rapat pleno itu hanya dihadiri oleh ketiga pasangan calon dan pendamping saja. Sedangkan para pendukung yang ikut hadir tidak boleh masuk ke area Gedung Serba Guna Sleman. "Memang sebelumnya masing-masing calon boleh membawa pendukung dengan jumlah terbatas. Tapi ternyata pengundian nomor urut hanya dihadiri pasangan calon saja. Alhamdulillah itu dipatuhi ketiga pasangan calon. Kalau ada pendukung yang hadir di luar area gedung, itu ranah Bawaslu," kata Trapsi.

Setelah pengundian nomor urut, dilanjutkan dengan deklarasi kampanye damai dari ketiga pasangan calon. Bahkan ketiga pasangan calon juga melakukan pakta integritas kampanye damai, lancar dan aman. Acara itu dihadiri Bupati Sleman, Kapolres Sleman dan Dandim Sleman.

Menanggapi hasil undian, Danang Wicaksana Sulistya-Agus Choliq mengatakan, nomor itu memang sudah sesuai slogan yang digaungkan yakni 'nyawiji nyembadani'. Nomer 1 ini bisa jadikan arti bersatu untuk Sleman lebih baik.

"Elemen masyarakat bersatu untuk memenangkan kami. Selain itu, mengatasi permasalan di Sleman dengan persatuan dan kesatuan," katanya.

Sedang menurut pasangan Sri Muslimatun-Amin Purnama, semua nomer itu baik karena hanya sebagai pembeda pasangan calon saja. Kemudian semua nomor itu punya arti. "Nomor satu itu dibuka, nomor dua dicoblos dan nomor tiga ditutup. Itu langkah ketika nanti coblosan," ujar Muslimatun sambil tersenyum.

Sedangkan Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa menilai, nomor 3 ini melambangkan modal hidup manusia yaitu cipta, rasa dan karsa. Hal itu akan diimplementasikan dengan jujur, kreatif dan solutif dalam membangun Sleman kedepan. "Mari *sesarengan mbangun* Sleman untuk menjadi lebih baik lagi. **(Sni/Aha)-f**

Wujudkan

Sambungan hal 1

PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang resmi diundangkan pada 23 September 2020. Berdasarkan salinan dokumen PKPU 13/2020, larangan mengenai konser musik sebagai kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 88C Ayat (1) huruf b.

Selain konser musik, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni dan panen raya juga dilarang oleh KPU.

"Ketentuan Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020: (1) partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk: b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik," kata Plh Ketua KPU Ilham Saputra mengutip bunyi PKPU 13/2020 yang disampaikan melalui pesan singkat, Kamis (24/9). **(Ati)-d**

Jurnalisme

Sambungan hal 1

Ada beberapa hal kenapa KR lekat dengan jurnalisme angkringan ala DIY. Pertama, KR setia kepada Bahasa Jawa. Slogan KR berbunyi *migunani tumraping liyan*, artinya berguna bagi sesama. KR juga memiliki rubrik Mekarsari yang di dalamnya memuat cerita pendek, puisi, dan artikel dalam Bahasa Jawa. Selain itu, ada pula rubrik Banyumasan yang ditulis dalam Bahasa Jawa Dialek Banyumas. Semua itu merupakan ikhtiar KR dalam melestarikan Bahasa Jawa.

Kedua, KR menjadi media belajar bagi pelajar DIY. Pelajar TK dan SD/sederajat tiap pekan disuguhkan rubrik Kawanku yang memuat cerita anak, puisi anak, dan gambar karya anak. Selanjutnya, pelajar SMP dan SMA/sederajat tiap pekan juga disuguhkan rubrik Kaca yang memuat cerita pendek remaja, puisi remaja, dan reportase seputar dunia remaja. Melalui rubrik-rubrik itu, KR sedang menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar DIY.

Ketiga, KR juga menjadi media bagi penumbuhan literasi keindonesiaan. Rubrik Analisis KR dan Opini KR nyatanya diisi oleh penulis multibidang dan berdomisili di Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, Surakarta, dan Surabaya. Demikian halnya rubrik Budaya yang memuat cerita pendek, puisi, dan esai; yang penulisnya juga multibidang dan lintasdaerah. Adanya tulisan multibidang dan lintasdaerah dapat memperkaya cakrawala pengetahuan kita semua.

Keempat, KR konsisten lewat kegiatan kemanusiaan. Lewat rubrik Migunani dan Dompet KR Bersama, tergantung peristiwa yang terjadi, --kini ëKita Melawan Virus Koronaí – KR mendorong para pembaca setianya dan masyarakat DIY untuk berbagi dengan sesama. Kegiatan media yang sangat layak didukung dan diapresiasi.

Kelima, KR menjadi garda terdepan dalam pembinaan Bahasa Indonesia. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009 bahwa Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa media massa, KR sudah menunjukkan hal itu. Sejak terbit awal tahun 1945 hingga sekarang, KR selalu komitmen mengikuti ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku. Dimulai dari Ejaan Soewandi, Ejaan yang Disempurnakan, hingga Ejaan Bahasa Indonesia.

Dari butir pertama hingga butir kelima di atas, menunjukkan betapa KR konsisten menjalani jurnalisme angkringan. Ada usulan terkait perayaan HUT ke-75 KR, yaitu saatnya KR memberikan penghargaan Anugerah Kesetiaan Berkarya bagi para penulis yang sudah konsisten menulis di KR puluhan tahun. Penghargaan itu penting, mengingat tak banyak orang yang mau konsisten menulis di koran. Dirgahayu KR. Semoga tetap *migunani tumraping liyan!*

(*Penulis adalah Dosen PBSI FKIP UAD; Mahasiswa S-3 Ilmu Pendidikan Bahasa UNY)-d*

Gubernur

Sambungan hal 1

Ganjar meminta Walikota Tegal agar tidak memberi izin acara yang mengundang kerumunan massa. Kalau mau acara pernikahan, silakan tapi dibatasi orangnya dan tertutup. Tidak boleh lagi ada kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa.

Kasatpol PP Jateng Budiyanto mengatakan, pihaknya langsung menelepon Kasatpol PP Kota Tegal, Hartoto. Dari sambungan telpon yang dilakukan di hadapan Ganjar itu, Kasatpol PP Kota Tegal mengatakan, sebenarnya sudah diberikan imbauan, tapi kondisi di lapangan terjadi seperti itu. "Itu awalnya orang punya hajat, memang itu ada hiburan dangdut. imbauan sudah disampaikan, saya sendiri juga kondangan di sana. Itu yang punya gawe kebetulan dari Wakil Ketua DPRD," kata Hartoto.

Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, saat dikonfirmasi membenarkan dirinya ditegur Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Kapolri terkait peristiwa itu. Dedy mengaku kecolongan dengan peristiwa itu, karena pihak penyelenggara mengatakan acara digelar secara sederhana. **(Bdi)-f**

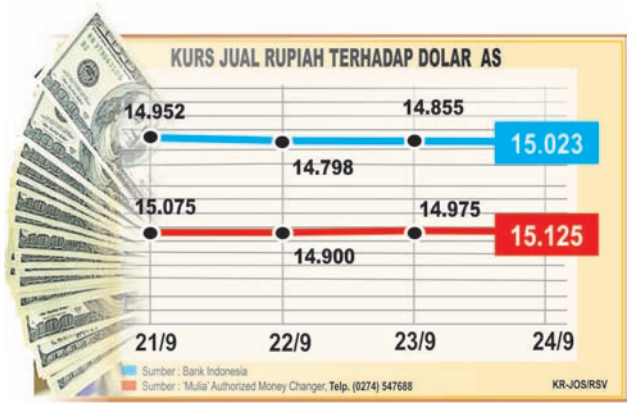

Prakiraan Cuaca Jumat, 25 September 2020

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-32	60-95
Sleman					23-32	60-95
Wates					23-32	60-95
Wonosari					23-32	60-95
Yogyakarta					23-32	60-95

Cerah Berawan · Berawan · Udara Kabur · Hujan Lokal · Hujan Petir

Grafis : Arko

PROGRAM PADAT KARYA KEMENHUB

Serap 16.686 Tenaga Kerja

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhu–bungan (Kemenhub) berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satu bukti nyatanya pemberdayaan masyarakat melalui Program Padat Karya.

Program Padat Karya ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi dampak ekonomi terhadap masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono berharap, Program Padat Karya ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan produksi dan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja sementara, perluasan akses pelayanan dasar dan peningkatan aksesibilitas desa. "Sampai September 2020 ini telah terserap tenaga kerja sebanyak 16.686 orang untuk Program Padat Karya di sektor transportasi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia," ujar Djoko Sasono.

Jenis padat karya di sektor transportasi sendiri terdiri dari pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi. "Masing-masing dari Direktorat Jenderal dan Badan di Kementerian Perhubungan telah melaksanakan Program Padat Karya tersebut dengan baik," jelas Djoko Sasono.

Dalam pelaksanaannya, Program Padat Karya sempat mengalami hambatan di beberapa lokasi. Bahkan sempat ada penghentian pelaksanaan konstruksi oleh pihak Pemda/masyarakat karena pandemi Covid-19. "Namun Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim Satgas Covid-19 setempat sehingga pelaksanaan konstruksi termasuk kegiatan Padat Karya tetap dapat berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan," kata Djoko Sasono.

Djoko Sasono juga menambahkan, kebijakan pembangunan infrastruktur TA 2021 Program Padat Karya menjadi prioritas untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. Optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode Padat Karya antara lain pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi. **(lmd)-f**

Putusan

Sambungan hal 1

disebutkan, insan komisi yang sedang menjalani sanksi ringan, sedang dan/atau berat tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

"Apa dampaknya kepada yang bersangkutan? Kalau sudah pernah melakukan pelanggaran etik dan sudah dijatuhi sanksi, perbuatan berikutnya akan dijatuhkan sanksi yang lebih berat lagi," papar Albertina.

Terhadap sanksi tersebut Firli pun menerimanya. "Saya pada kesempatan ini memohon maaf kepada masyarakat yang merasa tidak nyaman. Putusan saya terima dan saya pastikan tidak akan mengulangi, terima kasih," kata Firli.

Sebelumnya Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, semua yang disampaikan sudah diperiksa dalam klarifikasi dan tidak ditemukan adanya pembuktian tentang pertemuan antara yang bersangkutan dengan seseorang dari pihak penyedia jasa penerbangan.

"Begitu pun pihak penyedia sudah memberikan keterangan yang jelas, semua itu tidak ada pemberian atau fasilitas yang diberikan termasuk diskon," tutur Tumpak.

Dewas lanjut Tumpak, hanya membahas atau mengadili yang berhubungan dengan pedoman perilaku. "Itulah yang disebut insan KPK harus memposisikan diri, dia adalah insan KPK," kata Tumpak seraya menyebutkan, dalam pertimbangan majelis etik Dewas, bukan Firli yang menginisiasi penyewaan helikopter, tapi ia hanya menyampaikan informasi soal helikopter.

"Tidak ada perintah langsung ke Kevin (ajudan Firli) terkait penyewaan heli, tapi secara implisit terperiksa minta Kevin untuk mencari informasi, maka Kevin selaku ajudan pun mencarikan informasi tersebut," tutur Tumpak. Kevin, katanya, lalu mengatakan ada helikopter yang disewakan PT Air Pasifik Utama dengan sewa Rp 7 juta perjam.

Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar menyatakan, terperiksa mengaku penggunaan helikopter itu bukanlah menunjukkan kesombongan, bukan pula bertujuan menunjukkan gaya hidup terperiksa yang berlebih-lebihan. "Beda cerita kalau seminggu sekali sewa pesawat dan makan di restoran mewah, dan itu tidak pernah dilakukan terperiksa," ungkapnya.

Artidjo juga membacakan keterangan Firli yang menilai tidak ada hal yang dilanggar dengan menggunakan helikopter tersebut dan Firli tidak tahu salahnya di mana.

Sementara itu, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai KPK. Ia mengajukan surat pengunduran diri sejak 18 September kepada Pimpinan, Sekjen dan Kepala Biro SDM KPK. "*Ya*, dengan segala kecintaan saya pada KPK, saya pamit," kata Febri. **(Ful)-d**